

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan teori paradigma *e-government* dapat disimpulkan secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan paradigma *e-government* dalam pelaksanaan SPBE. Namun masih ada beberapa hal yang perlu untuk dimaksimalkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penerapan paradigma *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Orientasi pelaksanaan SPBE yang menekankan pada pemberian produk dan pelayanan harus berorientasi pada kepuasan masyarakat dan fleksibel harus diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pelaksanaannya, telah terlihat orientasi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada kepuasan yang baik dirasakan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan. Dinas memperoleh predikat baik dalam IKM dan mayoritas polling yang diselenggarakan melalui daring masyarakat merasa sangat puas. Penyediaan sarana akses masyarakat ke dinas yang beragam mendukung orientasi fleksibel di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pelaksanaan SPBE memerlukan perubahan pada proses organisasi dalam bentuk struktur organisasi, organisasi jejaring dan pembagian informasi antar pegawai. Pada penelitian ini, peneliti menemukan perubahan proses organisasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan berupa perubahan struktur organisasi dari dinas tipe c menjadi tipe b yang berdampak pada penambahan jumlah bidang pada dinas untuk mengerjakan tugas. Perubahan berupa organisasi jejaring untuk melaksanakan tugas pada dinas yang bertambah mendukung adanya aktifitas berbasis proses sehingga meningkatkan efisiensi kinerja. Namun, proses organisasi dalam SPBE belum sepenuhnya dijalankan karena belum adanya pembagian informasi menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Perubahan struktur dan jejaring organisasi telah memberikan dampak pada kemampuan dan kecepatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi, sistem informasi yang terintegrasi seharusnya dapat diterapkan oleh dinas yang akan berdampak pada kemudahan pegawai dalam tukar-menukar data dan informasi.

3. Prinsip manajemen yang fleksibelitas dan kerja sama antar bidang juga diterapkan dalam pelaksanaan SPBE. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip manajemen yang fleksibelitas dan kerja sama antar bidang telah dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan baik. Hal ini tergambar dari kemampuan dinas dalam mengatasi masalah kekurangan pegawai dengan kerja sama yang dilakukan pegawai untuk saling membantu dalam menjalankan tugas.

Selain itu, prinsip manajemen yang penempatan pegawai sesuai keahlian memberikan dampak pada hasil kerja yang diperoleh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Pelaksanaan SPBE juga menuntut adanya gaya kepemimpinan yang inovatif, fasilitasi dan koordinasi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Dinas berupa memfasilitasi pemikiran dan pendapat pegawai melalui diskusi informal di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang membuat pelaksanaan SPBE dapat berjalan dengan optimal. Dengan adanya keterbukaan pegawai pada Kepala Dinas akan pemikiran dan pendapat, membuat inovasi-inovasi baru dapat bermunculan dan diselenggarakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan seperti aplikasi Open Data Pesisir Selatan dan Aplikasi I-TOP.
5. Komunikasi internal dalam pelaksanaan SPBE diterapkan dalam komunikasi langsung dan Jejaring (*network*) multi arah dengan koordinasi sentral. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi internal yang sesuai dengan pelaksanaan SPBE telah dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dapat diselenggarakan karena adanya pelaksanaan komunikasi langsung antar pegawai atau dalam bentuk grup-grup komunikasi dengan memanfaatkan aplikasi komunikasi. Selain itu, setiap pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan juga telah di fasilitasi dengan perangkat elektronik berupa komputer dan laptop untuk berkomunikasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Pelaksanaan SPBE menuntut adanya komunikasi eksternal yang bersifat formal dan informal, umpan balik langsung dan cepat, serta mendukung adanya berbagai macam saluran komunikasi. Komunikasi eksternal dengan formal dan informal telah dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan baik dalam bentuk rapat-rapat maupun penggunaan media elektronik untuk berkomunikasi. Hal ini berdampak pada hubungan baik dinas dengan mitra kerja dalam melaksanakan tugas dan mengambil keputusan yang dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Komunikasi dengan menggunakan perangkat elektronik dengan mitra kerja juga dapat dilaksanakan karena adanya grup-grup komunikasi dalam format kelompok yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Bentuk penyerahan pelayanan dalam pelaksanaan SPBE diwujudkan dalam penerapan *electronic exchange* dan Interaksi tidak muka-dengan muka (sejauh mungkin). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah sepenuhnya menggunakan perangkat elektronik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Pelaksanaan SPBE yang menuntut adanya *electronic exchange* telah terselenggara dengan memanfaatkan web dinas dan web PPID untuk melaksanakan pelayanan informasi publik. Pelayanan surat-menyurat pada saat ini tidak ada lagi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan adanya pemanfaatan web dinas dan web PPID untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, pelayanan dengan interaksi sejauh mungkin

dapat diwujudkan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Prinsip penyerahan pelayanan dalam pelaksanaan SPBE yang memperlakukan setiap masyarakat sesuai dengan keinginan pemakai (*customization*) dan personal diterapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk dapat memenuhi keinginan dan kesesuaian masyarakat akan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan berbagai macam informasi yang disediakan oleh dinas yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi seputar Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan juga menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi jika memerlukan informasi yang tidak disediakan. Hal ini membuat pelayanan informasi publik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan bisa bersifat personal yang akan memenuhi setiap keinginan masyarakat akan informasi-informasi yang dibutuhkan.

6.2 Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan bukan hanya PPID.
2. Adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia agar kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih fleksibel.
3. Pembuatan Sistem Informasi Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan perlu diciptakan untuk penyimpanan arsip yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dinas.
4. Perlu adanya pemeriksaan kembali oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terhadap web dinas dan PPID dari bag dan informasi yang tidak relevan lagi.

